

PELAKSANAAN PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDESAAN

Unggul Priyadi

Abstract

In 1993 Indonesian Government launched first IDT (Inpres Desa Tertinggal) program. IDT program is more than government effort to eliminate poverty, but a rural development strategy. It is directed to hike economic autonomy and to accelerate growth by increasing social economic activity based on decentralization principles. Cooperation between government and society is an important aspect in this program.

How is it implementation and yield prospect? One of the challenges is how to coordinate and to integrate with another sectoral and regional development program so that it will be a systematic and integrated strategy. All of resources, both of government and society, must be utilized to support this program.

DALAM PJP II kesadaran dalam melaksanakan pembangunan telah digariskan untuk makin mewujudkan keadilan dan pemerataan. Secara khusus, GBHN 1993 menegaskan bahwa untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, diperlukan usaha yang terpadu dan secara berkelanjutan agar tidak berkembang ke arah terciptanya kecemburuan sosial yang dapat menghambat pembangunan ekonomi khususnya dan usaha pembangunan secara umum.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang tengah dikembangkan pemerintah dewasa ini adalah memberi bantuan kepada desa-desa tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Pada hakekatnya, studi tentang program IDT merupakan bagian dari studi tentang pembangunan perdesaan, karena program IDT diperuntukkan terutama bagi penduduk miskin yang berada di perdesaan yang diwujudkan dalam bentuk kelompok dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui usaha-usaha produktif.

Pengertian Pembangunan Perdesaan dapat ditinjau dari dua aspek (Inayatullah, 1977). Pembangunan perdesaan dalam arti yang sempit, terbatas sebagai proses penyebaran teknologi pertanian saja; atau proses memoderenkan struktur tradisional di desa melalui hubungannya dengan

unsur-unsur dari luar sedemikian rupa sehingga sikap dan ketrampilan baru bisa disebarkan diantara penduduk yang pada gilirannya akan membantu membangkitkan gerakan pembangunan wilayah perdesaan. Pembangunan perdesaan harus ditinjau pada cakupan yang lebih luas tidak hanya mengenai hal-hal teknik, sosial dan kultur yang berpengaruh pada pengembangan perdesaan, tetapi juga pada aspek politik dan kebijakan-kebijakan.

Definisi pembangunan perdesaan tersebut mempunyai beberapa implikasi penting. *Pertama*, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh dari penduduk perdesaan dalam mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini hanya dapat dicapai kalau pembangunan perdesaan itu merupakan proses pengembangan kemandirian mereka. *Kedua*, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan yang tidak hanya terbatas pada kelompok kuat di perdesaan melainkan harus merata diantara penduduk.

Kedua faktor tersebut mengarah pada upaya menghindarkan penduduk perdesaan dari hambatan-hambatan dari luar yang mengurangi potensi mereka serta membatasi keikutsertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan dua aspek penting dari definisi

pembangunan perdesaan tersebut, maka telah dikembangkan 7 indikator pembangunan perdesaan, sebagai berikut : (1) Perubahan produktivitas perdesaan, (2) Perubahan tingkat kesempatan kerja dan pengangguran, (3) Perubahan dalam pembagian pendapatan, (4) Perubahan dalam struktur kekuasaan, (5) Perubahan tingkat mobilitas sosial, (6) Perubahan dalam nilai kepercayaan dan sikap terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, (7) Perubahan sasaran pelayanan sosial

Dalam upaya memenuhi indikator-indikator keberhasilan pembangunan perdesaan pemerintah telah menempuh berbagai program, antara lain : (1) Berbagai program BIMAS, dan Insus Pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, (2) Program pembinaan industri kecil, Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Koperasi Unit Desa (KUD) dan lain-lain dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan, (3) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dimaksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, (4) Program Transmigrasi dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan mobilitas sosial, (5) Program Keluarga Berencana (KB), pendidikan gizi, siaran (radio dan televisi) untuk desa, koran masuk desa dan lain-lain dimaksudkan untuk mengubah dan mengarahkan sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan kemajuan dan wawasan lingkungan lebih luas, (6) Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, SD Inpres, Inpres Pasar, Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lain-lain dimaksudkan untuk memberi fasilitas dan dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program-program tersebut diselenggarakan oleh berbagai aparat dari berbagai Departemen, dan untuk mencapai sasaran yang efektif perlu dipadukan dengan berbagai koordinasi. Memang masih perlu diadakan berbagai penelitian untuk mengetahui apakah beragam indikator keberhasilan tujuan pembangunan perdesaan dapat

dicapai. Keberhasilan program-program tersebut pada satu pihak tergantung dari kemampuan aparat pemerintah dalam melakukan pelayanan sampai pada masyarakat desa, dan di pihak lain tergantung pada kemampuan masyarakat desa menjangkau pelayanan yang disediakan untuk mereka. Hal yang terakhir ini memerlukan dorongan dan dinamika penduduk perdesaan sendiri untuk menjangkau pelayanan yang tersedia.

Bambang Ismawan (dalam Peter Hagul 1992) menyatakan bahwa pentingnya pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada pengembangan potensi, kesadaran dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Inti pendapat ini adalah agar program pembangunan perdesaan diarahkan kepada kemampuan masyarakat, serta tujuannya diharapkan mendekati keinginan masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan tersebut terutama bertumpuh pada potensi dan daya masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), sampai pada kampung dan desa karena pada akhirnya masyarakat-setempatlah yang akan merasakan hasil pembangunan serta sekaligus sebagai umpan balik pembangunan itu sendiri.

KEMISKINAN DI PERDESAAN

Sajogyo (1996) menyatakan bahwa kemiskinan menunjuk ke situasi serba kekurangan penduduk yang terwujud oleh, antara lain: modal terbatas, rendahnya pengetahuan/ketrampilan, produktivitas dan pendapatan rendah, begitu pula nilai tukar hasil produksinya, ditambah kesempatan terbatas untuk berperan dalam pembangunan lokal.

Secara harafiah, kata miskin diberi arti "tidak berharta benda". Siapa yang dapat digolongkan sebagai orang miskin sesuai definisi tersebut? Untuk kepentingan studi yang berhubungan dengan kemiskinan, Sajogyo membedakan tiga tipe orang miskin seperti yang dikutip oleh L. Dyson (dalam Bagong Suyanto, ed.1995), yaitu antara lain: miskin (*poor*), sangat miskin

(*very poor*), dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diwujudkan dalam bentuk beras yang diperoleh setiap orang dalam setiap tahun. Orang miskin berpenghasilan 320 kg beras/orang/tahun, orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg-320 kg beras/orang/tahun, orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg-240 kg beras/orang/tahun.

Kriteria yang digunakan BPS adalah penghasilan sebesar Rp. 20.614,00 perkapita per bulan untuk penduduk daerah perkotaan dan Rp. 13.295,00 perkapita perbulan untuk daerah pedesaan. Terlepas dari kriteria pendapatan yang digunakan BPS tersebut sudah kadaluarsa atau masih relevan, satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa dibandingkan daerah perkotaan, kemiskinan di pedesaan ternyata jauh lebih parah. Kenyataan ini agak mengherankan karena bila dibandingkan dengan daerah perkotaan, program-program pembangunan yang ditujukan untuk mengentaskan masyarakat pedesaan dari kemiskinan sesungguhnya jauh lebih banyak.

Bantuan teknologi dan banyak dana sudah dikucurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun yang mengherankan adalah mengapa kemiskinan di pedesaan masih tetap ada dan bahkan cenderung semakin terpolarisasi bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kemiskinan di pedesaan masih tetap merebak ?

Faktor penyebab mengapa kemiskinan di pedesaan masih tetap mencolok sekurangnya ada empat faktor (Ghose dan Griffin (1983), Chambers (1983), dalam Petrus 1996).

Pertama, karena adanya pemusatan pemilikan tanah yang dibarengi dengan adanya proses fragmentasi pada arus bawah masyarakat pedesaan. Jumlah penduduk pedesaan yang terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan bertambahnya tanah, telah menyebabkan semakin berkurangnya tanah yang dapat dimiliki petani kecil sehingga terjadi apa yang disebut *Geertz* sebagai *shared poverty* (pembagian kemiskinan).

Disamping itu, tekanan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat dan harga produksi pertanian yang tidak menentu menyebabkan banyak warga desa sedikit demi sedikit terpaksa harus menjual lahan miliknya agar tetap hidup.

Kedua, karena nilai tukar hasil produksi warga pedesaan khususnya sektor pertanian yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, karena lemahnya posisi masyarakat desa khususnya petani dalam mata rantai perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses penjualan biasanya pihak yang dominan menentukan harga yaitu para pedagang atau tengkulak.

Keempat, karena karakter struktur sosial masyarakat pedesaan yang terpolarisasi. Selama ini sudah banyak program pembangunan diintroduksi ke wilayah pedesaan. Tetapi, karena hanya elit-elit desa saja yang dapat memanfaatkan terlebih dahulu, maka biasapun terjadilah.

Kekuatan masing-masing faktor diatas sudah tentu tidak sama. Tetapi apabila keempat faktor tersebut secara bersama-sama dialami pada suatu desa, maka dapat dipastikan bahwa warga masyarakat pedesaan yang miskin bukan saja akan semakin tertinggal oleh laju pembangunan, tetapi bukan tidak mungkin mereka akan menjadi korban pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu usaha pemerintah untuk membuat peta-peta kemiskinan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program IDT, adalah langkah yang sangat baik sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program IDT tidak akan berarti bila tidak diimbangi dengan dukungan aparat pemerintah lokal dan dukungan persiapan yang memadai.

PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN

Usaha mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan

merupakan salah satu prioritas utama yang ditekankan pemerintah dalam tahap akhir pada pembangunan Jangka Panjang Pelita VI. Perencanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan tersebut lebih banyak berorientasi pada pendekatan delapan jalur pemerataan. Pendekatan demikian sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan jalur-jalur tersebut. Aspek pemerataan biasanya dikaitkan dengan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan dan lebih diarahkan pada peningkatan pendapatan golongan penduduk miskin, sehingga segala hasil pembangunan yang dicapai dapat dinikmati secara merata oleh lapisan masyarakat, dan tingkat kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi dapat dikurangi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk rasio gini dan kriteria Bank Dunia. Nilai rasio gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila rasio gini sama dengan 0 menandakan adanya pemerataan yang sempurna, dan bila sama dengan 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan. Untuk menghitung distribusi pendapatan dari nilai ini, dipergunakan data pengeluaran. Sedangkan menurut kriteria Bank Dunia, untuk mengukur pemerataan pendapatan, Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu 40 persen penduduk berpenghasilan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketidakmerataan sebaran pendapatan diukur berdasarkan besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan ketentuan bila kelompok ini menerima kurang dari 12 persen dari total pengeluaran, maka kelompok ini memiliki tingkat ketidakmerataan pendapatn "tinggi". Bila kelompok ini menerima 12 - 17 persen, maka kelompok ini memiliki tingkat ketidakmerataan pendapatan "sedang", sebaliknya apabila kelompok ini menerima lebih 17 persen dari total pengeluaran, maka

tingkat ketidak merataan pendapatan tergolong "rendah".

Besarnya rasio gini di daerah perkotaan selama kurun waktu 1987-1993 mengalami kenaikan. Pada tahun 1987-1993 mengalami kenaikan. Pada tahun 1987 tercatat 0,32 dan tahun 1993 sebesar 0,33. Untuk daerah perdesaan pada kurun waktu yang sama tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,26. Dengan demikian tingkat pemerataan pendapatan penduduk di perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan (BPS, 1996).

Berdasarkan distribusi pendapatan masyarakat, proses pemerataan pendapatan selama kurun waktu 1987-1993, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan relatif berhasil. Dengan mengacu kriteria Bank Dunia, 40 persen penduduk berpenghasilan rendah pada tahun 1990 (perkotaan + perdesaan) telah memperoleh 21,31 persen dari total pendapatan, walaupun kemudian pada tahun 1993 angka ini turun menjadi 20,34 namun kelompok ini termasuk memiliki tingkat ketidakmerataan pendapatan "rendah".

Indikator lain untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah adalah melalui pola konsumsi penduduk daerah tersebut. Secara umum, bila pendapatan semakin meningkat, maka persentase pengeluaran untuk makanan semakin berkurang mengingat seluruh kebutuhan pokok untuk makanan sudah terpenuhi, sehingga pengeluaran untuk bukan makanan menjadi semakin besar. Sebaliknya bila tingkat pendapatan masih rendah, maka pengeluaran untuk kebutuhan makanan cenderung lebih dominan dibanding bukan makanan.

Dalam periode 1990-1993 pengeluaran rata-rata perkapita makanan terus menurun dari 60,63 persen hingga 56,86 persen. Sebaliknya pengeluaran untuk bukan makanan dalam periode yang sama terus meningkat. Hal serupa terjadi pula di daerah perkotaan dan perdesaan. Namun pengeluaran di perdesaan untuk makanan masih jauh lebih besar dibanding pengeluaran bukan

untuk makan. Sementara di perkotaan, pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan hampir seimbang, bahkan pada tahun 1993 pengeluaran untuk bukan manakan sudah mencapai 50,19 persen. Keadaan ini menandakan adanya pergeseran pola konsumsi penduduk, walaupun tingkatannya berbeda antara perkotaan dan perdesaan (BPS, 1996). Aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi nampaknya terus diupayakan oleh pemerintah. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa diikuti peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat akan menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI IDT

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang telah melekat dengan kehidupan masyarakat perdesaan khususnya maupun kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya pelaksanaan pembangunan relatif sudah lama mendapat perhatian pemerintah.

Pada awal Tahun 1990-an pemerintah melalui BAPPENAS merumuskan Proyek Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT) untuk dilak-

sanakan oleh para Gubernur KHD Tingkat I dan Walikota Madya/Bupati KDH Tingkat II melalui surat No. 2037 D.V.05.1990). Melalui kebijakan ini sasaran yang diharapkan meliputi: (1) pendekatan keterpaduan secara lintas sektoral yang berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah utama (2) partisipasi seluruh masyarakat (3) satuan kerja geografis UDKP.

Sebagai tindak lanjut Program PKLT dalam upaya penanggulangan kemiskinan dipertegas dengan dimasukkan dalam GBHN 1993. Sebagai penjabaran dari usaha penanggulangan kemiskinan tersebut dituangkan dalam Program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (PPK). Tindak lanjut operasionalnya adalah diwujudkan Program INPRES Desa Tertinggal (IDT) yang diatur dalam Kepres No. 5 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993. Sebagai tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ditegaskan kembali oleh pemerintah pada saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1997: *"...Dalam rangka itu, program-program memerangi kemiskinan mendapat perhatian utama. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang telah memasuki tahun keempat adalah salah satu program prioritas di antaranya. Upaya besar ini akan terus kita lanjutkan.*

Tabel 1:
Distribusi Persentase Pengeluaran, 1990-1993

PENGELUARAN PER KAPITA	1990	1993
40% berpenghasilan rendah	21,31	20,34
40% berpenghasilan sedang	36,75	35,90
20% berpenghasilan tinggi	41,94	43,76

Sumber: SUSENAS, 1990 dan 1993 (dalam Indikator Kesejahteraan Anak dan Pemuda 1996).

Karena, dana IDT terus bergulir di masyarakat. Juga kita perkuat dengan berbagai upaya tambahan, yaitu dengan Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) yang sementara ini diprioritaskan di desa-desa IDT dan dengan program pembangunan prasarana perdesaan untuk mengatasi masalah kekurangan prasarana yang menjadi penyebab ketertinggalan desa-desa tersebut. Mulai tahun ini program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan lagi dengan Program Takesra/Kukesra yang dikonsentrasikan di desa-desa non-IDT. Untuk lebih mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk upaya pemerataan pembangunan antar daerah, tahun ini secara berkala saya menyelenggarakan sidang-sidang kabinet khusus yang temanya adalah Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan. Dengan demikian, Insya Allah, dalam REPELITA VII kita dapat menyingkirkan kemiskinan dari tengah-tengah masyarakat kita."

Mengkaji lebih mendalam pokok pikiran yang mendasari program IDT adalah ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama pemerintah mengarahkan segala upaya pada penanggulangan kemiskinan, di tempat penduduk miskin terkonsentrasi atau kantong-kantong kemiskinan. Dengan pokok pikiran itu berbagai program pembangunan sektoral dan regional perlu senantiasa dikoordinasikan dan dipadukan sehingga memberi dampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

Melalui Program IDT diarahkan untuk menciptakan kemandirian usaha dan juga menciptakan gerak pertumbuhan yang dipercepat di desa dengan peningkatan kegiatan sosial ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan partisipasi. Dengan demikian melalui Program IDT diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya setempat. Kegiatan sosial ekonomi yang diciptakan adalah kegiatan yang sumberdayanya ada di masyarakat, proses produksinya dilakukan oleh masyarakat serta pemasarannya dikuasi oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan dapat berlang-

sung secara berkelanjutan.

Tantangan untuk menanggulangi kemiskinan melalui IDT yang di dalamnya terdapat nuansa untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya adalah upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.

Melalui pengelolaan modal dan sumberdaya potensial serta memperhatikan tantangan yang ada, kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan, kebijaksanaan yang langsung ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dan kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Kriteria yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan minimum untuk hidup ini diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama. Angka pengeluaran minimum sebagai batas garis kemiskinan tahun 1993 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 27.905,- per kapita per bulan untuk daerah kota dan Rp 18.244,- untuk daerah perdesaan. Perubahan Batas Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin ditunjukkan pada lampiran 1.

Adapun desa yang menjadi garapan dalam Program IDT tahun 1993 adalah 20.663 desa tertinggal (rincian lengkap pada lampiran 2).

Seiring adanya laju perkembangan harga yang terjadi, pada tahun 1996 penentuan batas kemiskinan diperbaharui seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami penurunan. Selama pelaksanaan Program IDT kurun waktu 1993-1996 dapat dicapai pengurangan jumlah penduduk miskin dalam jumlah yang relatif banyak. Dalam kurun waktu tersebut penduduk miskin berkurang 3,4 juta atau 13,1% dibanding dengan pengurangan yang terjadi tiga tahun sebelumnya yaitu antara tahun 1990-1993 sebesar 1,3 juta atau 4,5%. Apabila diamati secara mendalam, secara prosentase jumlah penduduk miskin telah berkurang namun dengan penduduk kita yang sudah mendekati 200 juta jiwa maka secara absolut penduduk miskin masih tersisa cukup besar (22,5 juta atau 11,28 persen). Dengan membandingkan data pada lampiran 1 secara lebih mendalam, penurunan penduduk miskin secara prosentase relatif tidak berbeda secara nyata meskipun penurunan secara absolut sangat nampak.

Atas tekad yang ditetapkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan keberhasilan yang telah dicapai meskipun masih terdapat berbagai catatan, ternyata pada bulan September yang lalu pemerintah Indonesia mendapat anugerah dari badan dunia UNDP (*United Nations for Development Programme*). Salah satu dasar pertimbangan dari anugerah tersebut karena kemiskinan absolut dianggap menurun drastis dari 65 persen pada tahun 1970-an dan menjadi sekitar 11 persen (22 juta jiwa). Pada akhir tahun 1990-an. Dengan adanya penghargaan dari UNDP tersebut, diharapkan pola dan strategi yang di kembangkan di Indonesia dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain untuk mengatasi kemiskinan.

PENUTUP

Tekad pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin nampak semakin kuat. Hal ini diamati dengan *political will* pemerintah yang menempatkan penanggulangan kemiskinan merupakan program utama di antara berbagai program pokok lainnya dalam pembangunan jangka panjang kedua (PJP II).

Tabel 2
Batas Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1993-1996

DAERAH DAN TAHUN	BATAS GARIS KEMISKINAN (rupiah)	PENDUDUK MISKIN	
		Persen	Jumlah (juta)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
1993	27.905	13,45	8,70
1996	38.246	9,71	7,20
Perdesaan			
1993	18.244	12,79	17,20
1996	27.413	12,30	15,30

Sumber: SUSENAS, 1993 dan 1996 (dalam *Indikator kesejahteraan Anak dan Pemuda 1996*)

Pada tingkat global, upaya penanggulangan kemiskinan ini akan memantapkan daya saing dan kemandirian bangsa. Sebaliknya, apabila program pengentasan kemiskinan gagal, maka yang akan terjadi adalah makin melebar jurang antara kaya dan miskin. Kesenjangan ekonomi yang berkepanjangan dan makin parah antar golongan ekonomi di dalam masyarakat sangat memungkinkan menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan nasional.

Oleh karenanya usaha-usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan perlu mendapatkan dukungan semua

pihak. Implikasinya meskipun program penanggulangan kemiskinan bukanlah satu-satunya program pemerataan, upaya membangun usaha kecil sangat perlu untuk terus di kembangkan dalam upaya untuk menghindarkan jatuhnya mayoritas masyarakat yang bergerak pada usaha kecil jatuh ke dalam perangkap kemiskinan.

Dalam konteks ini, jika ada upaya yang terpadu dan terarah, dengan koordinasi yang lebih baik, maka segenap sumberdaya yang dicurahkan dalam berbagai program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan diharapkan mencapai hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (1991), *Pidato Ilmiah Purna Bakti Guru Besar IPB*.
- _____. (1996), "Peranan Pemimpin Formal Desa dalam Mensukseskan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Bogor". *Tesis (unpublished) Program Studi SPO, Pasca sarjana IPB, Bogor*.
- _____. (1997), *Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus*.
- _____. (1996), Tim P3PK, Pengembangan kawasan Terpadu (PKT), Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri.
- Moh. Amaludin, (1987), *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial*. Jakarta: UI - Press.
- BPS, (1997) *Indikator Kesejahteraan Anak dan Pemuda 1996*.
- Bappenas - Depdagri, (1994), *Paduan Program IDT*, Jakarta.
- Bambang Ismawan, dalam Peter Hagul, (1992), *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Inayatullah (ed), (1977), *Pembangunan dan Organisasi Perdesaan*. Jurusan Sosek IPB, Bogor.
- Koentjaraningrat, dalam Miriam Budiarjo, (1984), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta; PT. Sinar Harapan.
- Mubyarto, dkk., (1993), *Desa-desa Kalimantan*, Yogyakarta; Aditya Media.
- Mubyarto, (1994), *Profil Desa Tertinggal Indonesia*, Yogyakarta; Aditya Media.
- Sandi, I Made, (1989), *Pembangunan Wilayah*, Jakarta; FMIPA UI.

Sajogyo, (1996), "Program IDT Dalam Menanggulangi Kemiskinan", Makalah pada *Pelatihan Analisis Data Susenas*, Jakarta,BPS.

Lampiran 1:
Batas Garis Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin per Propinsi, 1993

Tahun	BATAS MISKIN (RP/KAPITA/BULAN)		PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
1976	4.522	2.849	38,79	40,37	10,0	44,2	54,2
1978	4.969	2.981	30,84	33,38	8,3	38,9	47,2
1980	6.831	4.449	29,04	28,56	9,5	32,8	42,3
1981	9.777	5.877	28,06	26,49	9,3	31,3	40,6
1984	13.731	7.746	23,14	21,18	9,3	25,7	35,0
1987	17.381	10.294	20,14	16,44	9,7	20,3	30,0
1990	20.614	13.295	16,75	14,33	9,4	17,8	27,2
1993	27.905	18.244	13,56	13,79	8,7	17,2	25,9

Sumber : Ketua BAPPENAS, 1994.

Lampiran 2

Jumlah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Tertinggal Seluruh Indonesia (BPS, 1993)

NO.	PROPINSI	JUMLAH KABUPATEN TERTINGGAL	KECAMATAN TERTINGGAL	TERTINGGAL
1.	Daerah Istimewa Aceh	9	132	2.275
2.	Sumatra Utara	13	137	1.364
3.	Sumatra Barat	11	89	700
4.	Riau	7	65	460
5.	Jambi	6	43	275
6.	Sumatra Selatan	10	78	715
7.	Bengkulu	4	29	328
8.	Lampung	4	61	635
9.	DKI Jakarta	3	5	11
10.	Jawa Barat	21	366	1.560
11.	Jawa Tengah	32	436	2.439
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	37	111
13.	Jawa Timur	37	478	1.969
14.	Bali	8	28	98
15.	Nusa Tenggara Barat	6	47	125
16.	Nusa Tenggara Timur	12	97	468
17.	Timor Timur	13	58	312
18.	Kalimantan Barat	7	97	468
19.	Kalimantan Tengah	6	78	696
20.	Kalimantan Selatan	10	94	568
21.	Kalimantan Timur	5	55	505
22.	Sulawesi Utara	6	71	361
23.	Sulawesi Tengah	23	139	655
24.	Sulawesi Tenggara	4	54	327
25.	Maluku	4	47	812
26.	Irian Jaya	9	144	1.738
27.	INDONESIA	278	2.994	20.633

Sumber: Ketua BAPPENAS, 1994